

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA KEUANGAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA

Najla Nafisa¹, Adam Zakaria², Ratna Angraini³
Universitas Negeri Jakarta

Email: najlanafisaa7@gmail.com		No. Telp: 081221602638	
Submitted 18 Juni 2024	Accepted 21 Juni 2024	Published 28 Juni 2024	

ABSTRACT

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan pada Badan Pertanahan Nasional di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan di wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta berdasarkan rasio efektivitas dan efisiensi pada tahun 2019-2022. Teknik pengumpulan ini menggunakan data sekunder dan data primer dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kinerja keuangan Badan Pertanahan Nasional di Provinsi DKI Jakarta selama 2019-2022 secara umum sudah efisien dan efektif. Rasio efektivitas menunjukkan kinerja yang baik di BPN Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, meskipun BPN Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara belum sepenuhnya efektif. Secara keseluruhan, rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja keuangan di lima wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta sangat efisien.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Evaluasi Kinerja Keuangan, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi.

Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peraturan ini, pemerintah menekankan perlunya pengaturan anggaran yang tidak hanya memperhatikan alokasi dana, tetapi juga menitikberatkan pada pencapaian hasil dan kinerja secara efektif dan efisien. Dengan demikian, penggunaan anggaran berbasis kinerja diharapkan dapat memberikan arah yang lebih jelas dalam pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.

Anggaran memegang peranan penting sebagai sarana untuk mencapai target kinerja, menjadi pusat perhatian dalam pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja. Dalam konsep penyusunan anggaran ini, fokus tidak lagi ditempatkan pada pertimbangan sumber daya atau input semata, tetapi lebih difokuskan pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan ini, diharapkan terwujudnya pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan secara optimal input yang tersedia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran memiliki peran penting dalam menyajikan informasi terkait pelaksanaan pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan ini kemudian dibandingkan dengan anggaran yang telah disusun sebelumnya. Melalui Laporan Realisasi Anggaran, pemerintah dan pihak terkait dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan entitas tersebut serta menilai sejauh mana implementasi anggaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Analisis rasio laporan keuangan dalam konteks evaluasi keuangan telah menjadi praktek umum di lembaga organisasi yang memiliki orientasi komersial. Dalam konteks pemerintahan, analisis rasio laporan keuangan bermanfaat untuk merinci kinerja pemerintah yang bersangkutan, menyediakan landasan yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan pendapatan pada periode selanjutnya. Temuan dari analisis ini memberikan ukuran yang signifikan dalam menilai efektivitas pelaksanaan penerimaan, serta mengukur efisiensi dalam pengeluaran yang dijalankan selama tahun tersebut.

Penggunaan analisis rasio keuangan termasuk analisis rasio efektivitas dan rasio efisiensi telah menjadi pendekatan yang sangat relevan dan efektif. Analisis rasio efektivitas memungkinkan evaluasi terhadap sejauh mana instansi dapat mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan, sementara analisis rasio efisiensi membantu mengukur efektivitas pengelolaan sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, penerapan analisis rasio keuangan ini menjadi landasan penting dalam memahami kesehatan keuangan dan efisiensi operasional suatu instansi pemerintah.

Efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran merupakan hal yang krusial dalam menjaga keseimbangan keuangan sebuah lembaga pemerintahan. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu), tetapi juga menjangkau lembaga lain seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) berkaitan dengan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan belanja yang tercermin dari pola penyerapan anggaran dengan kecenderungan memiliki nilai tinggi pada triwulan 3 dan 4, yang berpotensi mengakibatkan ketidaksesuaian antara program yang direncanakan dengan realisasi anggaran. Di sisi lain, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga menghadapi tantangan serupa dalam mencapai efisiensi dan efektivitas, terutama dalam target sasaran anggaran yang belum sepenuhnya tercapai dan belum memberikan dampak yang diharapkan.

Berdasarkan PMK No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, laporan keuangan harus disusun dengan efektif dan efisien. Namun, berdasarkan wawancara awal dengan Bapak Reza selaku staf keuangan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta ditemukan isu di Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta yaitu masih belum efektif sehingga terjadi evaluasi dan review setiap triwulan.

Menurut Mahmudi (2019), terdapat pengukuran persentase kriteria tabel rasio dari rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Pengukuran kriteria Rasio efektivitas dengan persentase 100% keatas dikatakan sangat efektif, 90%-100% dikatakan efektif, 80%-90% dikatakan cukup efektif, 60%-80% dikatakan kurang efektif dan kurang dari 60% dikatakan tidak efektif sedangkan pengukuran kriteria tabel rasio efisien dengan persentase 100% keatas dikatakan tidak efisien, 90%-100% dikatakan kurang efisien, 80%-90% dikatakan cukup efisien, 60%-80% dikatakan efisien dan kurang dari 60% dikatakan sangat efisien.

Penelitian ini mengambil data APBN di wilayah Badan Pertanahan Nasional yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Alasan peneliti mengambil penelitian di wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta tersebut karena untuk mengetahui dan menganalisis seberapa baik dan besarnya dalam pengelolaan dan efisien keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga masing – masing wilayah kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan analisis kinerja keuangan. Analisis ini sangat penting dikarenakan akan dapat dijadikan sebuah pedoman untuk tahun berikutnya dan masa datang agar lembaga dapat melakukan perbaikan secara kedepannya. Dengan adanya hal ini akan dapat menunjukkan pencapaian yang ada di dalam lembaga seperti efektif dalam keuangan negara dan efisien dalam menggunakan keuangan negara.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan berbagai keragaman analisis kinerja keuangan di instansi pemerintahan. Menurut Susanti Annis (2021), berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan selama periode anggaran 2017 hingga 2020, berdasarkan rasio efektivitas dan efisiensi, mengalami penurunan alokasi anggaran yang diberikan. Menurut Nadia Resti Oktaviani dan Vina Citra Mulyandani (2022), berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa evaluasi mengenai efektivitas dan efisiensi anggaran belanja langsung di Perwakilan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat menunjukkan variasi hasil, variasi tersebut terlihat dari kriteria yang diperoleh setiap tahunnya. Menurut Sheila Desti Rahmi, Jenny Morasa dan Victorina Z. Tirayoh (2023), berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa analisis kinerja LRA selama 3 tahun berdasarkan rasio efektivitas tidak diketahui. Kesimpulan analisis kinerja LRA selama 3 tahun berdasarkan rasio efektivitas tidak diketahui, rasio efisiensi pada tahun 2018 berada pada kategori sangat efisiensi, pada tahun 2019 dan 2020 kurang efisiensi. Lalu berdasarkan analisis horizontal pendapatan dan belanja mengalami tren naik dan berdasarkan analisis vertikal pos belanja yang paling besar menggunakan anggaran dari total belanja ialah pos belanja pegawai tahun 2018. Menurut Paisal Jadid, Lalu Hamdani Husnan, Laila Wardani (2023) berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat jika dilihat dari tingkat ekonomis tahun anggaran 2018 dikategorikan cukup ekonomis, dilihat dari tingkat efisiensi pada tahun 2018 dikategorikan kurang efisien dan dari tingkat efektivitas pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami kestabilan pada kategori efektif.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan Pada Badan Pertanahan Nasional di wilayah Provinsi DKI Jakarta”**.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat diambil pertanyaan penelitian di dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana analisis dan evaluasi kinerja keuangan di wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi pada tahun 2019-2022. 2) Bagaimana evaluasi atas kinerja keuangan di setiap wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019-2022. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan di wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi pada tahun 2019-2022. 2) Untuk menganalisis dan mengevaluasi atas kinerja keuangan di setiap wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019-2022.

Konsep Yang diteliti Kinerja Keuangan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi

Menurut Sartika (dalam Atmaja & Himmati, 2023), konsep kinerja keuangan dapat dianggap sebagai cerminan dari hasil pencapaian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, program, dan kebijakan yang telah dijalankan dengan tujuan mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Menurut Alpi & Ramadhan (dalam Salsabilla & Alam, 2023), menjelaskan bahwa dalam konteks pemerintahan, evaluasi kinerja keuangan menjadi sarana yang sangat penting untuk mengevaluasi pencapaian yang telah dihasilkan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi organisasi. Adapun metode pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi menurut para ahli sebagai berikut: a) Menurut Mahmudi (2019), efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat keterkaitan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan yang ingin dicapai. Semakin besar kontribusi hasil terhadap pencapaian tujuan, semakin tinggi tingkat efektivitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, program, atau kegiatan. Berikut rumus yang digunakan peneliti dalam menghitung rasio efektivitas adalah $\text{Realisasi Penerimaan} / \text{Target Penerimaan}$. b) Menurut Mahmudi (2019), menjelaskan bahwa pengukuran efisiensi perbandingan antara hasil output dan input, atau dengan istilah lain, output per unit input. Kesuksesan efisiensi suatu organisasi, program, atau kegiatan diukur berdasarkan kemampuannya mencapai hasil output tertentu dengan menggunakan input yang seefisien mungkin, atau dengan menggunakan input yang telah ditetapkan, dapat menghasilkan output seoptimal mungkin (pengeluaran yang optimal).

Berikut rumus yang digunakan peneliti dalam menghitung rasio efisiensi adalah Realisasi Belanja/Realisasi Penerimaan.

Evaluasi kinerja keuangan daerah adalah proses menyeluruh yang dilakukan untuk menilai dan menganalisis efektivitas serta efisiensi pengelolaan keuangan publik oleh pemerintah daerah. Proses ini melibatkan berbagai metode dan alat analisis untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya keuangan yang tersedia, menjaga keseimbangan anggaran, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini juga penting untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, memastikan transparansi, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah

Metode Penelitian

Tempat yang diambil peneliti untuk melakukan penelitian ini yang bertempat di Badan Pertanahan Nasional di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sejak 08 Januari 2024 sampai dengan Juli 2024. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan yang peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder untuk menghitung dan menganalisis data dari laporan keuangan realisasi anggaran Badan Pertanahan Nasional di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan data primer sebagai pendukung data sekunder yaitu dengan mewawancarai pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta untuk menanyakan hasil perhitungan yang telah dihitung oleh peneliti dengan menggunakan rumus rasio yang sesuai dengan kriteria dalam tabel rasio agar hasil analisis tersebut dapat akurat, jelas dan tepat.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan metode triangulasi. Menurut Sugiyono (2019: 368), menjelaskan bahwa dalam menguji kredibilitas, triangulasi mengacu pada pemeriksaan data dari beragam sumber dengan pendekatan yang berbeda-beda dan pada waktu yang beragam. Dalam penelitian ini, metode triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber.

Teknik analisis data merupakan langkah yang penting dalam merancang penelitian, yang melibatkan pengolahan data dan informasi dengan tujuan untuk mengevaluasi kevalidan hasil penelitian dan menghasilkan informasi baru yang bernilai. Berikut adalah langkah-langkah teknik analisis data yang terdapat dalam penelitian ini: 1) Mengumpulkan data Laporan Realisasi Anggaran Badan Pertanahan Nasional di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2019-2022. 2) Menghitung data menggunakan rumus rasio efektifitas dan efisiensi. 3) Membandingkan hasil perhitungan dengan kriteria tabel rasio. 4) Menganalisis hasil perhitungan dan menyiapkan untuk wawancara dengan Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta. 5) Melakukan wawancara dengan pihak Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta untuk konfirmasi terkait hasil perhitungan yang telah dihitung oleh peneliti. 6) Menganalisis hasil wawancara dan mengintegrasikannya ke dalam kesimpulan akhir.

Hasil dan Pembahasan**Hasil Perhitungan dan Pembahasan Kinerja Keuangan BPN di wilayah Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi**

Uraian	Tahun Anggaran				Rerata
	2019	2020	2021	2022	
BPN Jakarta Timur					
Rasio Efektivitas	88,05%	148,56%	82,78%	55,38%	93,69%
Rasio Efisiensi	56,10%	32,03%	34,97%	33,91%	39,25%
BPN Jakarta Pusat					
Rasio Efektivitas	103,11%	125,88%	95,70%	151,67%	119,09%
Rasio Efisiensi	32,73%	24,16%	32,73%	18,62%	27,06%
BPN Jakarta Barat					
Rasio Efektivitas	57,75%	93,90%	45,06%	99,71%	74,11%
Rasio Efisiensi	41,50%	15,83%	35,17%	22,47%	28,74%
BPN Jakarta Selatan					
Rasio Efektivitas	91,77%	97,16%	90,17%	121,40%	100,13%
Rasio Efisiensi	24,67%	17,71%	17,42%	21,47%	20,32%
BPN Jakarta Utara					
Rasio Efektivitas	104,64%	104,97%	54,96%	60,59%	81,29%
Rasio Efisiensi	18,80%	13,99%	23,58%	21,98%	19,59%

Sumber: Diolah oleh peneliti (Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, 2024)

Berdasarkan dari hasil pembahasan wilayah BPN Jakarta Timur, BPN Jakarta Barat serta BPN Jakarta Utara memiliki nilai rasio efektivitas terendah. Hal ini penyebab utama dari ketidakefektifan ini adalah tingginya target penerimaan yang tidak sebanding dengan realisasi penerimaan. Hal ini terjadi karena wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara memiliki area yang luas dengan jumlah bidang tanah yang banyak, namun realisasi penerimaannya menurun. Penurunan penerimaan ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam layanan pertanahan. Layanan pertanahan menjadi kurang efektif karena banyak masyarakat lebih memilih menggunakan PTKL (Pendaftaran Tanah Kota Lengkap) yang tidak membayar. Program PTKL ini dibiayai dari pendapatan umum yang berasal dari rupiah murni, sehingga anggaran untuk layanan rutin menjadi terbatas. Selain itu, tantangan ekonomi yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia pada umumnya, serta pandemi yang melanda pada rentang tahun tersebut, turut berkontribusi terhadap ketidakefektifan kinerja keuangan BPN. Pembatasan-pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mengurangi aktivitas luar rumah juga berdampak pada penerimaan PNBPN di wilayah-wilayah tersebut. Dengan demikian, dari hasil pembahasan ini adalah bahwa kinerja keuangan BPN di beberapa wilayah DKI Jakarta selama tahun 2019 hingga 2022 mengalami ketidakefektifan yang disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan pemerintah, serta preferensi masyarakat terhadap layanan PTKL yang gratis.

Namun, sebaliknya dengan wilayah yang kinerja keuangannya secara keseluruhan selama empat tahun yang memiliki nilai tertinggi berada di wilayah BPN Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Hal ini dikarenakan di wilayah tersebut berhasil mempertahankan kinerja yang efektif selama empat tahun dalam periode 2019-2022 dengan melakukan berbagai inovasi layanan pertanahan. Inovasi tersebut mencakup layanan pada hari Sabtu dan Minggu, program pengantaran sertifikat ke rumah bagi lansia, dan layanan prioritas tanpa perantara. Tujuan

inovasi ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan pertanahan secara optimal, sehingga kinerja efektif dapat terus dipertahankan melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan di masing-masing wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta selama periode 2019 hingga 2022, bahwa kinerja keuangan BPN di wilayah Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan sudah "Sangat Efisien". Keberhasilan ini tercapai karena BPN berhasil memenuhi setiap rencana kinerja yang telah ditetapkan, baik dari segi capaian fisik maupun realisasi anggaran. Untuk mempertahankan efisiensi, BPN DKI Jakarta melakukan evaluasi berkala dan memberikan penghargaan kepada satuan-satuan kerja yang berprestasi. Selain itu, pengelolaan sumber daya yang optimal dan efektif selama periode tersebut mencerminkan rasio efisiensi yang rendah, menunjukkan bahwa operasional BPN Provinsi DKI Jakarta dijalankan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan standar efisiensi yang ditetapkan. Dengan demikian, BPN di wilayah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019-2022 secara konsisten mencapai kriteria "Sangat Efisien".

Hasil Pembahasan Evaluasi Kinerja Keuangan BPN di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan hasil analisis evaluasi kinerja keuangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Wilayah DKI Jakarta, peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi kinerja keuangan akan terus dilakukan terhadap Kantor Pertanahan Kota Administrasi se-Provinsi DKI Jakarta untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sudah baik serta memperbaiki aspek yang kurang dengan inovasi baru, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dan mencapai target kinerja yang lebih baik serta memberikan layanan maksimal kepada masyarakat. Kinerja keuangan BPN Jakarta Selatan dan Jakarta Barat menunjukkan hasil baik dengan pelaporan tepat waktu dan realisasi belanja tinggi. Namun, Jakarta Selatan perlu mempercepat pencairan anggaran dan laporan pertanggungjawaban, sementara Jakarta Barat perlu mempercepat proses laporan persediaan. Kinerja keuangan BPN Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara kurang efektif, karena keterbatasan SDM yang kompeten. Kendala lain adalah sosialisasi mengenai peraturan baru yang masih kurang terhadap pegawai. Disamping itu hal lain yang menjadi kendala adanya program kerja yang dilaksanakan secara bersamaan pada triwulan ketiga dan keempat yang menyebabkan target triwulan pertama dan kedua tidak tercapai maksimal. Meskipun ada kendala di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur sudah memiliki indikator kinerja pelaksana anggaran (IKPA) yang baik. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan beberapa saran yaitu: 1) Program kerja dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan sepanjang tahun. 2) Meningkatkan pengetahuan serta keterampilan SDM di bidang keuangan. 3) Kegiatan yang menjadi tanggung jawab kantor tanah sebaiknya dianggarkan dan dicairkan langsung oleh kantor tanah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran. 4) Masih diperlukan perbaikan efisiensi operasional, sosialisasi peraturan yang intensif dan kepatuhan terhadap peraturan di BPN DKI Jakarta.

Kesimpulan

Kinerja keuangan Badan Pertanahan Nasional di Provinsi DKI Jakarta selama periode empat tahun, yaitu dari 2019 hingga 2022, berdasarkan analisis rasio efektivitas dan rasio efisiensi secara umum sudah efisien dan efektif. Penjelasan kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut: a) Kesimpulan kinerja keuangan BPN di wilayah Provinsi DKI Jakarta dilihat dari rasio efektivitas (realisasi penerimaan/target penerimaan) menunjukkan bahwa rata-rata selama empat tahun (2019-2022) kinerja keuangan di wilayah BPN Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan secara keseluruhan sudah baik. Meskipun ada beberapa wilayah pada periode anggaran antara

2019-2022 belum efektif (BPN Jakarta Timur, BPN Jakarta Barat dan BPN Jakarta Utara) namun, secara umum wilayah tersebut efektif. b) Kesimpulan kinerja keuangan BPN di wilayah Provinsi DKI Jakarta dilihat dari rasio efisiensi (realisasi belanja/realisasi penerimaan) menunjukkan bahwa rata-rata selama empat tahun (2019-2022) kinerja keuangan di wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan dalam 5 wilayah tersebut sudah "Sangat Efisien".

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi kinerja keuangan BPN di Wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut: a) Terus dilakukan untuk mempertahankan kinerja yang baik dan meningkatkan aspek yang kurang dengan inovasi sistem untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi mencapai target kinerja yang optimal dan layanan yang maksimal kepada masyarakat. b) Masih ada kendala di beberapa wilayah terkait SDM. c) Diperlukan program kerja dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. d) Meningkatkan pengetahuan serta keterampilan SDM di bidang keuangan agar kinerja lebih efektif. e) Dibutuhkan perbaikan efisiensi sosialisasi peraturan yang intensif dan kepatuhan terhadap peraturan di BPN DKI Jakarta.

Saran

Melihat masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan pada penelitian ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperbaiki kekurangan yang ada di penelitian ini. Berikut ini rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu: 1) Diharapkan untuk mengembangkan informan wawancara dari berbagai bidang atau unit kerja yang berbeda di dalam organisasi. 2) Diharapkan dapat mengkaji metode yang digunakan untuk pengumpulan data dan menggunakan strategi manajemen waktu yang efisien dan efektif. 3) Diharapkan untuk dapat memperluas cakupan sampel penelitian agar mencakup lebih banyak instansi pemerintahan atau wilayah geografis lainnya.

Referensi

- Atmaja, D. K., & Himmati, R. (2023). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Di Wilayah Mataraman Tahun 2019-2020. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam*, 3(1), 1–18.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2003). UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA. *Demographic Research*, 49(0), 1-33 : 29 pag texts + end notes, appendix, referen.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2010). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. *Demographic Research*, 49(0), 1-33 : 29 pag texts + end notes, appendix, referen. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5115/pp-no-90-tahun-2010>.
- Dona, E. M., & Lestari, V. A. (2020). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 135. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i2.2877>.
- Harahap, A. W., . M., Ilmiha, J., & Effendi, S. (2021). Analisis Growth Ratio, Rasio Efektivitas Dan Efisiensi Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 8(1), 39–44. <https://doi.org/10.30743/akuntansi.v8i1.4063>.

- Hasan, J., Umar, A., & Kurung, N. (2020). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja Pegawai pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pulau Morotai. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 6(4), 750–757. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4302789>.
- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Creswell, John W & Clark, V. L. P. (2015). *Understanding Research: A Consumer's Guide (2nd Edition)*.
- Indrayani, I., & Khairunnisa, K. (2019). Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value for Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe: (Studi Kasus Pada Dpkad Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.29103/jak.v6i1.1820>.
- Jadid, P., Husnan, L., & Wardani, L. (2023). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERIODE 2018-2020 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram Paisal Jadid / A1B118175 / Analisis Kinerja. *Jurnal Keuangan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bsinis Universitas Mataran (JRK)*, 1(1), 56–67.
- Karnawan, R., Siswanto, A., & Digdowiseiso, K. (2024). *Analysis of the Ratio of Growth , Effectiveness and Budget Efficiency at the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia in 2017 – 2022*. <https://doi.org/10.46799/jss.v5i2.809>.
- Kuntadi, C., & Dian Rosdiana. (2022). Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan: Perencanaan Anggaran, Peraturan, Koordinasi (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 142–152. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i2.1201>.
- Mahsun. (2016). *Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik*. Universitas Kristen Duta Wacana.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. STIM YPKN.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik (edisi 3 Cet 2)*. UPP STIM YPKN.
- Makaminang, N. E., Ilat, V., Rudy, H., Wokas, N., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Bisnis, D., Ratulangi, U. S., & Bahu, J. K. (2022). Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado Evaluation of Effectiveness and Efficiency in the Budget Realization Report At The Manado City Regional Research and. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 325–334.
- Mayasari, R., Febriantoko, J., Africano, F., & Loressa, M. (2021). Efisiensi Dan Efektivitas Belanja Langsung Pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 180. <https://doi.org/10.32502/jab.v6i2.4172>.

- Oktaviani, N. R., & Mulyandani, V. C. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Langsung Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2020. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 2(2), 484–493. <https://doi.org/10.35313/ialj.v2i2.3219>.
- Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010. (2020). *Peraturan Presiden Republik Indonesia NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR*.
- Pettasolong, N., Gobel, Y., & Kurniawan, A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Pendekatan Value for Money Pada Satuan Kerja Iain Sultan Amai Gorontalo Periode Tahun 2019-2021. *AKASYAH: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.58176/akasyah.v2i1.132>.
- Perbendaharaan, K. K. R. D. J. (2014). *Pokok-Pokok Siklus APBN Di Indonesia*. Kementerian Keuangan.
- Permenkeu RI. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472*, 670.
- Polii, I. R. A., Saerang, D. P. E., & Tangkuman, S. J. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value for Money. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 8(4), 781–788.
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1), 1–10.
- Ratri, A. K., & Retnosari. (2023). Analysis of the Effectiveness and Efficiency of the Magelang City Government Area'S Financial Performance for the 2017-2021 Fiscal Year. *Cashflow : Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*, 2(2), 305–314. <https://doi.org/10.55047/cashflow.v2i2.517>
- Salsabilla, R. V., & Alam, I. A. (2023). Penilaian Akuntabilitas Keuangan Sektor Publik untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung. *Jurnal EMT KITA*, 7(4), 1149–1156. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i4.1605>.
- Septiani, S., Yamin, M., Yulia Defitri, S., & Sukraini, J. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Solok). *Ebismen*, 1(3), 1–21.
- Sheila, S. D. R., & Rahmi, S. D. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2020 Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(1), 292–300. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i1.45645>.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti Annis, R. S. S. D. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Pada

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan*, 5(3), 153–162. <https://jurnal.saburai.id/index.php/jmms/article/view/1339>.

Creswell, John W & Clark, V. L. P. (2015). *Understanding Research: A Consumer's Guide (2nd Edition)*.

Menpan, H. (2019). *Pencegahan Inefisiensi dan Inefektivitas Anggaran Rp 392 Triliun Bukan Kebocoran*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pencegahan-inefisiensi-dan-inefektivitas-anggaran-rp-392-triliun-bukan-kebocoran>.